



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

Jatinangor, 27 Desember 2021

Nomor	: 423.4/2224/IPDN	Yth.	1. Gubernur Nusa Tenggara Barat
Sifat	: Biasa		2. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat
Lampiran	: 1 (satu) Berkas		
Perihal	: Izin Penelitian Bagi Praja Utama Angkatan XXIX IPDN		di – Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.5 - 621 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.5 - 442 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Tahun 2021/2022, pelaksanaan kegiatan Penelitian bagi Praja Utama Angkatan XXIX Institut Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 dalam rangka pengumpulan data penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada Praja Utama IPDN untuk melakukan penelitian pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan lokasi penelitian masing-masing sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Dr. Hadi Prabowo, MM

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tempat Penelitian Praja Utama.

Lampiran : Surat Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Nomor : 423.4/2224 /IPDN
Tanggal : 27 Desember 2021

Daftar Peserta Penelitian Praja Utama Program Sarjana Terapan Angkatan XXIX
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2021/2022
Provinsi Nusa Tenggara Barat

I. Fakultas Manajemen Pemerintahan

NO	NAMA	L/P	NPP	PROGRAM STUDI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
1.	HARDIKA RAKHMADI RAMADHAN	L	29.1254	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	EFEKTIVITAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MITIGASI KEBAKARAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.	M FAKHRI SAMPUTRA	L	29.1263	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	MANAJEMEN PELAYANAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DOMPU
3.	ALDI GUMURUH WICAKSONO	L	29.1710	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	PERAN BADAN KEAMANAN DESA DALAM PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WISATA HIJAU BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	DESA WISATA HIJAU BILEBANTE
4.	MUHAMMAD ASYRAF BIMA SHABARTUM	L	29.1264	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BIMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA
5.	FAHMI RACHMAT WAHYUDIN	L	29.1252	PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG	STRATEGI PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	L/P	NPP	PROGRAM STUDI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
6.	MUHAMMAD DARIN FIRYAL	L	29.1265	KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	OPTIMALISASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA MATARAM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KOTA MATARAM

II. Fakultas Politik Pemerintahan

NO	NAMA	L/P	NPP	PROGRAM STUDI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
1	I MADE BRAMANTYA PURANA	L	29.1255	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GAMAK (GERAKAN ANTI MERARIQ KODEQ) DALAM UPAYA MENEKAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIK KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
2	IVAN RENALDI SUDARSO	L	29.1258	POLITIK INDONESIA TERAPAN	PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA GENERASI-Z DI KOTA MATARAM	KOTA MATARAM
3	RIYAN SAPUTRA	L	29.1269	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KELURAHAN KUMBE KECAMATAN RASANA E TIMUR KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	KANTOR KELURAHAN KUMBE KECAMATAN RASANA E TIMUR KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4	RIZKI APRILIO CENDANA PUTRA	L	29.1279	POLITIK INDONESIA TERAPAN	STRATEGI KEMENANGAN DRS. H. MAHMUD ABDULLAH DAN DEWI NOVIANY S.PD., M.PD SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUMBAWA	KABUPATEN SUMBAWA

III. Fakultas Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA	L/P	NPP	PROGRAM STUDI	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
1.	HARDIKA RAKHMADI RAMADHAN	L	29.1254	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	EFEKTIVITAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MITIGASI KEBAKARAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.	ALDI GUMURUH WICAKSONO	L	29.1710	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	PERAN BADAN KEAMANAN DESA DALAM PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WISATA HIJAU BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	DESA WISATA HIJAU BILEBANTE
3.	MUHAMMAD ASYRAF BIMA SHABARTUM	L	29.1264	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BIMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA
4.	FAHMI RACHMAT WAHYUDIN	L	29.1252	PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG	STRATEGI PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
5.	MUHAMMAD FIRYAL DARIN	L	29.1265	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OPTIMALISASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA MATARAM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MATARAM


Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Dittdg Prabowo, MM